













taubatnya atau tidak diampuni. Sedangkan pada ayat kelima dijelaskan bahwa kemurkaan Allah swt. akan menyimpannya. Dan pada ayat terakhir, orang-orang kafir tersebut tidak akan dapat memberi *maḍarat* sama sekali kepada Allah swt. Namun tidak ada satu pun ayat di atas yang menjelaskan hukuman mati bagi orang murtad.

Perlu dicatat bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan murtad turun di periode Madinah, ketika negara Islam didirikan, dan hanya surat al-Naḥl 106 saja yang termasuk kategori Makkiyyah.<sup>11</sup> Sehingga dapat disimpulkan, dari sekian ayat yang berkenaan dengan murtad, tidak ada satu pun ayat yang mencamtumkan perintah eksekusi mati bagi pelaku murtad. Bahkan, ayat-ayat tersebut memberikan konsekuensi hukuman di akhirat, tidak ada sanksi atau pun hukuman yang bersifat duniawi.

Seharusnya konseptualisasi perbuatan *riddah* yang ada di dalam Alquran maupun *al-Sunnah* dipertemukan dengan pendekatan komplementatif, bukan kontradiktif. Artinya jika perbuatan *riddah* hanya ditujukan pada keyakinan diri sendiri, tanpa mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk *murtad*, kondisi negara sedang damai, serta orang lain tidak terganggu dengan kemurtadan orang tersebut, maka baginya tidak ada sanksi di dunia, melainkan hanya ada sanksi yang bersifat *ukhrawi*. Sementara jika murtad dibarengi dengan mengajak muslim lainnya serta menjelek-jelekkkan agama Islam, maka dapat dikenakan hukuman *ta'zir* dan termasuk dalam jarimah *tasabbub 'alā al-din al-ghaīr* (mencaci maki agama lain). Termasuk tindak pidana juga adalah mencaci maki agama orang lain

---

<sup>11</sup> M. Robith Fuadi Abdullah, "Meninjau hukuman Mati Bagi Orang Murtad (Kajian Hadis Tematik)" *de Jure*, Vol. 4, No. 1 (Juli 2012), 29.













































ruginya suatu perbuatan ini merupakan hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik di abad ke-18 untuk reformasi hukum yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Casare Beccaria. Perbuatan-perbuatan criminal dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat, dan sepadan.

4. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*).

Sistem pemidanaan demikian ialah mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat akan menurun. Dahulu dipakai sistem pemberian tanda kepada penjahat, misalnya dicap bakar, supaya orang jujur menghindarinya, atau terpidana dibuang atau dimasukkan dalam penjara. Diperkirakan biaya isolasi penjahat tersebut dari masyarakat akan kurang sebanding dengan kerugian yang mungkin ditimbulkan jika ia dibiarkan bebas.

5. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*).

Tujuan ini banyak diajukan orang di zaman modern ini. Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap penjahat, sehingga tidak lagi melakukan kejahatan di masa yang akan datang. Bagi para psikiatris hal tersebut dapat dicapai dengan jalan menciptakan program-program yang bersifat nasihat-nasihat kepada individu dalam kelompok dan menciptakan suatu *milieu* yang dapat menyembuhkan penjahat. Bagi para sosiolog, maksud tersebut dapat dicapai dengan jalan mengadakan pendidikan dan latihan kerja

keatrampilan.<sup>36</sup> Untuk mencapai tujuan ini tentu tidaklah mudah, selain ikut andil, pemerintah juga harus bekerja maksimal dengan membuat aturan undang-undang serta program-program yang akan dicapai. Selain itu masyarakat pun juga harus sepakat mendukung peraturan serta program-program yang telah dibuat pemerintah.

Tahun 1948 merupakan tahun bersejarah dunia, setelah perang dunia ke-II, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) negara-negara di dunia menyerukan undang-undang terkait hak asasi manusia, undang-undang tersebut menekankan pada hak kebebasan, keadilan serta perdamaian dunia. Sudah tidak asing lagi, undang-undang tersebut dikenal dengan *Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Dengan lahirnya Deklarasi ini setiap individu akan lebih leluasa dengan hak kebebasannya, diharapkan setiap individu mulai sejak lahir memiliki kebebasan, keadilan serta keamanan.

Deklarasi Hak Asasi Manusia tersebut kemudian dikuatkan dan diinterpretasikan oleh negara di dunia Ketiga, dengan maksud menyesuaikannya dengan filosofi dan budaya lokal atau regional serta untuk mewujudkan stabilitas nasional sebagai persyaratan bagi pembangunan. Negara-negara Muslim pun berusaha memahami HAM ini dalam konteks Islam, sehingga pada 1990 negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengeluarkan *Cairo Declaration of Human Rights in Islam*. Dalam Deklarasi ini antara lain disebutkan, bahwa hak dan kebebasan harus tunduk kepada syariah (pasal 25).

---

<sup>36</sup> A. Hamzah, A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 15.



















berkembang, termasuk negara-negara Islam.<sup>52</sup> Terdapat beberapa beberapa konsep HAM yang menurut beberapa negara berkembang tidak bisa diterapkan atau bahkan bertentangan dengan adat dan budaya setempat.

Ditinjau secara historis apa yang terjadi pada tanggal 10 desember 1948 merupakan titik kulminasi perjuangan umat manusia setelah menyaksikan kekejaman perang masa lalu.<sup>53</sup> Pemikiran tentang HAM dimulai ketika Perang Dunia II usai. Munculnya pemikiran hak asasi manusia yang digambarkan sebagai *universal inalienable* (tidak bisa dilenyapkan), dan *inviolable* (tidak dapat diganggu gugat) melalui para pemikir aliran *natural rights* (hak-hak alamiah) tidak bisa dihindarkan karena terbukti bahwa aliran hukum dan filsafat *positivist* telah menimbulkan bencana Perang Dunia II yang ditandai dengan pelanggaran hak asasi maha kejam, bahkan *genocide*.<sup>54</sup> Dengan situasi dan kondisi tersebut muncul suatu pemikiran dan gagasan untuk menciptakan masyarakat yang penuh aman dan damai.

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi totalitas kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikannya oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut memperoleh apresiasi secara positif. Hanya saja, regulasi dibutuhkan agar kepentingan dan kehendak

---

<sup>52</sup> Muhammad Tholchah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta: Lantabora Press, 2000), 251.

<sup>53</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997), 4.

<sup>54</sup> Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 187.













